



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan dari kelentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
2. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin, antara lain, izin usaha angkutan dan izin trayek.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.

6. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
7. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, agen tunggal pemegang merek dan asosiasi penjual kendaraan bermotor.
8. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2006.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan BBN-KB ditetapkan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor-faktor yang meliputi:
 - a. Tekanan gandar;
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00;
 - b. Mobil barang/peban, sebesar 1,30.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 8 dan kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Nilai jual kendaraan bermotor ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB berdasarkan hasil penjumlahan nilai jual kendaraan bermotor dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor:
- a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan belum ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, dengan ketentuan:
- 1) Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5% di bawah perkiraan harga isi (*on the road*).
 - 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dengan ketentuan:
- 1) Untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya.
 - 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Daerah masing masing.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau Tempel, dan Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
SEKDA		
ASISTEN		
SATUAN KERJA / UNIT PENGOLAH	KADISPENDA	
	KARO HUKUM	
	KABAG PER-UJUAN	
	KASUBAG RANKUM	

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 April 2007

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 10

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR
 TAHUN 2007

JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN

NO	KODING	MERK	TYPE	TH BUAAT	NLKB	ROBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101009 00130	ALFA ROMEO	15RBER 2000cc	2000	223,000,000	1.0	223,000,000
2				2001	229,000,000	1.0	229,000,000
3				2002	235,000,000	1.0	235,000,000
4				2003	241,000,000	1.0	241,000,000
5				2004	252,000,000	1.0	252,000,000
6	101009 00230	ALFA ROMEO	156CA V6 2.4 V	2000	219,000,000	1.0	219,000,000
7	101009 00330	ALFA ROMEO	188 3.0 L	2001	328,000,000	1.0	328,000,000
8				2002	337,000,000	1.0	337,000,000
9				2003	345,000,000	1.0	345,000,000
10				2004	360,000,000	1.0	360,000,000
11	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 (SPARK SALES SPEED)	2000	212,000,000	1.0	212,000,000
12				2001	217,000,000	1.0	217,000,000
13				2002	222,000,000	1.0	222,000,000
14				2003	228,000,000	1.0	228,000,000
15				2004	231,000,000	1.0	231,000,000
16				2005	264,000,000	1.0	264,000,000
17				2006	298,000,000	1.0	298,000,000
18				2007	312,000,000	1.0	312,000,000
19	101009 00530	ALFA ROMEO	A156 2.5 QUATTRO	2005	298,000,000	1.0	298,000,000
20	101009 00630	ALFA ROMEO	A166 2.0 L	2003	247,000,000	1.0	247,000,000
21				2004	258,000,000	1.0	258,000,000
22	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTTRONIC V6	2002	246,000,000	1.0	246,000,000
23				2003	273,000,000	1.0	273,000,000
24				2004	303,000,000	1.0	303,000,000
25				2005	337,000,000	1.0	337,000,000
26				2006	371,000,000	1.0	371,000,000
27				2007	418,000,000	1.0	418,000,000
28	101009 00830	ALFA ROMEO	HR 177cc	1999	14,000,000	1.0	14,000,000
29	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIC 3000cc	2000	199,000,000	1.0	199,000,000
30				2001	221,000,000	1.0	221,000,000
31				2002	246,000,000	1.0	246,000,000
32				2003	273,000,000	1.0	273,000,000
33				2004	303,000,000	1.0	303,000,000
34				2005	337,000,000	1.0	337,000,000
35				2006	374,000,000	1.0	374,000,000
36				2007	418,000,000	1.0	418,000,000
37	101024 00115	ASTON MARTIN	DB7 VANTAGE	2002	1,840,000,000	1.0	1,840,000,000
38				2003	1,972,000,000	1.0	1,972,000,000
39	101024 00215	ASTON MARTIN	DB9 VOLANTIERE	2005	1,440,000,000	1.0	1,440,000,000
40	101024 00315	ASTON MARTIN	VANTAGISH V12	2005	3,200,000,000	1.0	3,200,000,000
41	101027 00132	AUDI	A2 1800cc	2000	147,000,000	1.0	147,000,000
42	101027 00232	AUDI	A3 1.6 AT	2005	207,000,000	1.0	207,000,000
43				2006	217,000,000	1.0	217,000,000
44				2007	234,000,000	1.0	234,000,000
45	101027 00332	AUDI	A3 1.6 MT	2004	189,000,000	1.0	189,000,000
46				2005	194,000,000	1.0	194,000,000
47				2006	199,000,000	1.0	199,000,000

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NUKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
118				2007	10,000,000	1.0	10,000,000
119	702398 00625	VIVA	SAMSON SUPER	2006	9,600,000	1.0	9,600,000
120				2007	10,000,000	1.0	10,000,000
121	702399 00225	VIVAMAS	NEW SAMSON (RODA 3)	2002	6,000,000	1.0	6,000,000
122				2003	6,300,000	1.0	6,300,000
123				2004	6,800,000	1.0	6,800,000
124				2005	7,000,000	1.0	7,000,000
125				2006	7,400,000	1.0	7,400,000
126	702399 00325	VIVAMAS	SAMSON (RODA 3)	2001	5,200,000	1.0	5,200,000
127				2002	6,000,000	1.0	6,000,000
128				2003	6,300,000	1.0	6,300,000
129				2004	6,800,000	1.0	6,800,000
130				2005	7,000,000	1.0	7,000,000
131				2006	7,400,000	1.0	7,400,000
132	702399 00425	VIVAMAS	SAMSON LAKSANA (RODA 3)	2003	8,500,000	1.0	8,500,000
133				2004	8,600,000	1.0	8,600,000
134				2005	8,700,000	1.0	8,700,000
135	702399 00525	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2003	8,500,000	1.0	8,500,000
136				2004	8,600,000	1.0	8,600,000
137				2005	8,700,000	1.0	8,700,000

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
SEKDA			
ASISTEN	I		
SATUAN KERJA / UNIT PENGOLOLAH	KADISPENDA		
	KARO HUKUM		
	KABAD PER-UU-AN		
	KASUBAD RANKUM		

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2007
TANGGAL 19 APRIL 2007

NILAI JUAL RUBAH BENTUK

BENTUK DASAR TAHUN	STATIONWAGON/ MICROBUS	DOUBLE CABIN	BESTEL WAGON / DELVAN / BOX DAN SEJENISNYA	TANGKI	TRONTON / TANDUM	DUMP TRUCK	MIXER	DEREK	CRANE	LOADING TRUCK	TRACTOR HEAD / TRAILER	RIVER CONTAINER
PICK UP												
< 1988	3,000,000	2,000,000	4,000,000	5,000,000	—	—	—	2,000,000	—	—	—	—
1989 - 1991	4,000,000	3,000,000	5,000,000	6,000,000	—	—	—	3,000,000	—	—	—	—
1992 - 1994	5,000,000	4,000,000	6,000,000	7,000,000	—	—	—	4,000,000	—	—	—	—
1995 - 1997	6,000,000	5,000,000	7,000,000	8,000,000	—	—	—	5,000,000	—	—	—	—
1998 - 2000	7,000,000	6,000,000	8,000,000	9,000,000	—	—	—	6,000,000	—	—	—	—
2001 - 2002	8,000,000	7,000,000	9,000,000	10,000,000	—	—	—	7,000,000	—	—	—	—
2003	9,000,000	8,000,000	10,000,000	11,000,000	—	—	—	8,000,000	—	—	—	—
2004	11,000,000	10,000,000	12,000,000	13,000,000	—	—	—	9,000,000	—	—	—	—
2005	13,000,000	12,000,000	14,000,000	15,000,000	—	—	—	10,000,000	—	—	—	—
2006	15,000,000	14,000,000	16,000,000	17,000,000	—	—	—	11,000,000	—	—	—	—
2007	17,000,000	16,000,000	18,000,000	19,000,000	—	—	—	12,000,000	—	—	—	—
LIGHT TRUCK (<5000 CC)												
< 1988	4,000,000	—	5,000,000	6,000,000	5,000,000	7,000,000	—	3,000,000	—	—	—	10,000,000
1989 - 1991	5,000,000	—	6,000,000	7,000,000	6,000,000	8,000,000	—	4,000,000	—	—	—	15,000,000
1992 - 1994	6,000,000	—	7,000,000	8,000,000	7,000,000	9,000,000	—	5,000,000	—	—	—	20,000,000
1995 - 1997	7,000,000	—	8,000,000	9,000,000	8,000,000	10,000,000	—	6,000,000	—	—	—	25,000,000
1998 - 2000	8,000,000	—	9,000,000	10,000,000	9,000,000	11,000,000	—	7,000,000	—	—	—	30,000,000
2001 - 2002	9,000,000	—	10,000,000	11,000,000	10,000,000	12,000,000	—	8,000,000	—	—	—	32,000,000
2003	10,000,000	—	11,000,000	12,000,000	11,000,000	13,000,000	—	9,000,000	—	—	—	35,000,000
2004	12,000,000	—	13,000,000	14,000,000	13,000,000	15,000,000	—	10,000,000	—	—	—	37,000,000
2005	14,000,000	—	15,000,000	16,000,000	15,000,000	17,000,000	—	11,000,000	—	—	—	40,000,000
2006	16,000,000	—	17,000,000	18,000,000	17,000,000	19,000,000	—	12,000,000	—	—	—	45,000,000
2007	18,000,000	—	19,000,000	20,000,000	19,000,000	21,000,000	—	13,000,000	—	—	—	50,000,000
TRUCK >5000 CC												
< 1988	—	—	6,000,000	7,000,000	6,000,000	8,000,000	12,000,000	—	8,000,000	7,000,000	10,000,000	15,000,000
1989 - 1991	—	—	7,000,000	8,000,000	7,000,000	9,000,000	14,000,000	—	9,000,000	8,000,000	12,000,000	20,000,000
1992 - 1994	—	—	8,000,000	9,000,000	8,000,000	10,000,000	16,000,000	—	10,000,000	9,000,000	14,000,000	25,000,000
1995 - 1997	—	—	9,000,000	10,000,000	9,000,000	11,000,000	18,000,000	—	11,000,000	10,000,000	16,000,000	30,000,000
1998 - 2000	—	—	10,000,000	11,000,000	10,000,000	12,000,000	20,000,000	—	12,000,000	11,000,000	18,000,000	35,000,000
2001 - 2002	—	—	11,000,000	12,000,000	11,000,000	13,000,000	22,000,000	—	13,000,000	12,000,000	20,000,000	40,000,000
2003	—	—	12,000,000	13,000,000	12,000,000	14,000,000	24,000,000	—	14,000,000	13,000,000	22,000,000	45,000,000
2004	—	—	14,000,000	15,000,000	14,000,000	16,000,000	30,000,000	—	16,000,000	15,000,000	26,000,000	50,000,000
2005	—	—	16,000,000	17,000,000	16,000,000	18,000,000	34,000,000	—	18,000,000	17,000,000	30,000,000	55,000,000
2006	—	—	18,000,000	19,000,000	18,000,000	20,000,000	38,000,000	—	20,000,000	19,000,000	34,000,000	60,000,000
2007	—	—	20,000,000	21,000,000	20,000,000	22,000,000	42,000,000	—	22,000,000	21,000,000	38,000,000	65,000,000

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
SERBA	
ASISTEN	I
SATUAN KERJA / UNIT PEMOLAH	KADISPENDA
	KRRR HUKUM
	KASAB PERUBAHAN
	KASUBAB RANKUM

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

AGUSTIN TERAS NARANG